

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN (SIAK) BERDASARKAN PERMENDAGRI
NOMOR 7 TAHUN 2019**

Emilia Pamungkas Sari
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bhayangkara Surabaya
E-mail : emil31pamunkas@gmail.com

Abstrak

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bertujuan untuk mengelola dan menata administrasi kependudukan di Indonesia. Sistem ini tidak hanya untuk merealisasikan pengumpulan data base kependudukan yang akurat, lengkap, dan mutakhir. Tetapi juga dapat memberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) untuk setiap penduduk, sehingga dapat mengeliminasi identitas ganda atau NIK ganda. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dan apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dispenduk Capil Kab. Jombang . Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dimana teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi serta diolah menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang sudah berjalan dengan cukup baik. Hal ini dapat terlihat pada tahun 2019 adanya pemberlakuan pelayanan administrasi kependudukan secara daring berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 sehingga dalam implementasi sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dapat meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan serta tercapainya tertib administrasi kependudukan yang lebih maksimal.

Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, SIAK

Abstract

The Population Administration Information System (SIAK) is an information system that utilizes information and communication technology which aims to manage and organize population administration in Indonesia. This system is not only to realize an accurate, complete, and up-to-date population database collection. But it can also provide a Population Identification Number (NIK) for each resident, so that it can eliminate multiple identities or multiple NIKs. The formulation of the problem in this study is how the implementation of the population administration information system policy (SIAK) and what are the supporting factors and inhibiting factors that affect the implementation of the population administration information system policy (SIAK) in the Dispenduk Capil Kab. Jombang . This study aims to determine the extent to which the implementation of the population administration information system (SIAK) policy at the Department of Population and Civil Registration Kab. Jombang. In this study the authors used qualitative research methods where data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation and processed using qualitative descriptive methods. The results of the study stated that the implementation of the population administration information system (SIAK) policy at the Department of Population and Civil Registration Kab. Jombang has been going pretty well. This can be seen in 2019 the implementation of online population administration services based on Permendagri No. 7 of 2019 so that the implementation of the population administration information system (SIAK) can improve the quality of population administration services and achieve a more optimal population administration order.

Keyword : Implementation, Policy, SIAK

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai negara kepulauan, penduduk Indonesia memiliki persebaran yang tidak merata. Berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata sering kali melahirkan dan mendesak pemerintah untuk segera mungkin bertindak mengambil sebuah kebijakan. Menyikapi berbagai permasalahan itu pemerintah berusaha memperoleh data tentang kependudukan di Indonesia yang akurat untuk mampu membuat pemetaan yang tepat guna menanggulangi masalah kependudukan baik di tingkat lokal dan nasional. Data tersebut diperlukan untuk mampu membuat sebuah program dalam rangka pengendalian jumlah, pertumbuhan, dan pemerataan persebaran penduduk.

Sebagai salah satu langkah untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah mulai membuat sebuah kebijakan dengan mengadakan program yang dahulu dikenal dengan Sistem Informasi Manajemen Kependudukan (SIMDUK) yang dibuat sekitar tahun 1996. SIMDUK adalah sebuah kebijakan yang diterapkan di daerah kabupaten/kota, dan ditujukan untuk menangani status kependudukan dengan segala perubahannya. SIMDUK itu sendiri merupakan suatu aplikasi untuk mengelola data kependudukan daerah yang meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran, Sensus Penduduk, dan Demografi Penduduk. Pada pelaksanaannya di lapangan ternyata terdapat berbagai kelemahan SIMDUK sebagai sebuah sistem untuk mengelola data kependudukan seperti masih terdapat adanya Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda dan juga masih berpotensi terjadinya pemalsuan identitas karena disebabkan kurang detailnya data-data mengenai penduduk seperti pada kolom “pekerjaan” yang biasanya hanya diisi pekerjaan pegawai swasta.

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menggantinya dengan sebuah kebijakan yang baru. Kebijakan baru itu tentunya juga lebih menjawab segala kebutuhan yang diperlukan untuk melengkapi data kependudukan. Untuk membantu berbagai pekerjaan mengenai pendaftaran kependudukan yang sesuai dengan berbagai standar yang diperlukan maka pemerintah merumuskan sebuah kebijakan baru yaitu Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). SIAK merupakan suatu sistem informasi berbasis web yang disusun berdasarkan prosedur-prosedur dan memakai standarisasi khusus yang bertujuan menata sistem administrasi di bidang kependudukan sehingga tercapai tertib administrasi dan juga membantu bagi petugas di jajaran Pemerintah Daerah khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di dalam menyelenggarakan layanan kependudukan dan pencatatan Sipil. SIAK bisa menjadi solusi dari masalah kependudukan yang ada. Dengan adanya pengelolaan data secara online maka kelemahan-kelemahan pengolahan data secara konvensional dapat ditekan. Beberapa manfaat dari penerapan SIAK antara lain, hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik tersebut dapat digunakan sebagai bahan perumusan dan penyempurnaan kebijakan, strategi dan program bagi penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan lainnya. Melihat persoalan yang ada mengenai penerapan teknologi informasi, khususnya implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Maka dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang karena pada tahun 2019 untuk pengoptimalan dari implementasi SIAK sendiri Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang melaksanakan pelayanan berbasis daring atau online serta pola kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Jombang

mendapat penghargaan dari Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri). Dimana implementasi pelayanan kependudukan telah mampu memberikan pola terbaik bagi warga, dengan menggunakan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Adapun judul penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Permendagri Nomor 7 Tahun 2019 (Studi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang).

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka dalam

2. KAJIAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Menurut Charles. O Jones istilah kebijakan (*policy term*) digunakan dalam praktek sehari – hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda. Istilah ini sering dipertukarkan dengan tujuan (*goals*), program, keputusan (*decisions*), standard, proposal, dan *grand design*. (dalam Winarno, 2007:16) Robert Eyestone mengatakan bahwa “secara luas” kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya”. Konsep yang ditawarkan Eyestone ini mengandung pengertian yang sangat luas dan kurang pasti karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Thomas R. Dye yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan”. Walaupun batasan yang diberikan oleh Dye ini dianggap tidak tepat, namun batasan ini tidak cukup memberi pembedaan yang jelas antara apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah. (dalam Winarno, 2007:17)

penelitian ini akan mengajukan rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang ?

Menurut Anderson kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan. Selain itu, konsep ini juga membedakan kebijakan dari keputusan yang merupakan pilihan di antara berbagai alternative yang ada. (dalam Winarno,2007:18) Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa sebenarnya kebijakan publik secara sederhana adalah aktivitas-aktivitas pemerintah yang memiliki tujuan dan memiliki pengaruh terhadap kehidupan masyarakat luas, aktivitas yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara. Semua negara menghadapi masalah yang relatif sama, hanya saja yang membedakannya ialah bagaimana respon terhadap masalah tersebut. Respon ini yang disebut sebagai kebijakan publik.

Implementasi Kebijakan Model George C. Edwards

Menurut Edwards (Winarno, 2007:174), studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.

Menurut Edwards, terdapat empat faktor-faktor atau variabel-variabel yang bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan, Faktor-faktor atau variabel-variabel tersebut antara lain :

1) Komunikasi

Secara umum, Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Menurut Edwards, persyaratan pertama bagi implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus mengetahui apa yang mereka lakukan. Keputusan-keputusan kebijakan dan perintah-perintah harus diteruskan kepada personil yang tepat sebelum keputusan itu dapat diikuti. Tentu saja komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus dimengerti dengan cermat oleh para pelaksana.

2) Sumber – Sumber

Perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para

pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian, sumber-sumber dapat menjadi faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik. Sumber-sumber yang penting meliputi staf, informasi, wewenang, dan fasilitas.

3) Kecenderungan – Kecenderungan

Kecenderungan dari para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Kecenderungan-kecenderungan menunjuk karakteristik yang menempel erat kepada implementor kebijakan/program. Karakter yang dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen, dan demokrasi. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa berada diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam arus program yang telah digariskan dalam *guideline* program.

4) Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi menjadi sangat penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur organisasi ini mencakup dua hal penting, pertama adalah mekanisme dan kedua yaitu struktur organisasi pelaksana itu sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *Standard Operational Procedure (SOP)* yang dicantumkan dalam *guideline* program. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis, tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapa pun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor. Sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindari hal yang

berbelit, panjang, dan kompleks. Struktur organisasi pelaksana harus dapat menjamin adanya pengambilan keputusan atau kejadian luar biasa dalam program secara tepat.

Jadi, model implementasi George C. Edwards III inilah yang akan digunakan penulis di lapangan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan. Alasan penulis menggunakan model ini adalah karena variabel ataupun indikator yang dikemukakan George C. Edwards III merupakan variabel yang bisa menjelaskan secara komprehensif tentang kinerja implementasi dan dapat lebih konkret dalam menjelaskan proses implementasi yang sebenarnya.

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)

SIAK merupakan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggaraan dan instransi pelaksana sebagai satu kesatuan yang dimaksudkan untuk terselenggaranya administrasi kependudukan dalam skala nasional yang terpadu, tertib, terpenuhinya hak penduduk di bidang administrasi kependudukan dengan pelayanan yang profesional dan tersedianya data dan informasi mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya. Administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam rangka mewujudkan *database* kependudukan nasional. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) telah diatur dalam Permendagri No. 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Seiring

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi maka dalam hal pengoptimalan implementasi SIAK pada tahun 2019 diberlakukan pelayanan administrasi kependudukan secara daring berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.

Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan menurut D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999;38) dalam Pasolong (2010;59) terdapat 3 faktor, yaitu :

1. **Logika**, yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.
2. **Hakikat Kerjasama**, yang dibutuhkan yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif.
3. **Ketersediaan sumber daya manusia**, yang memiliki kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan menurut Bambang Sunggono terdapat 4 faktor, yaitu :

1. **Isi Kebijakan**
Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari

timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

2. Informasi

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi

3. Dukungan

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

3. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam Penelitian ini digunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Lokasi Penelitian

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang.

Sumber Informasi

- a. Ibu. Tatik Sri Berdikariwati, S.E (Kepala Bidang Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan)
- b. Ibu. Hesti Hermawanti, S.E.,M.Si (Kepala Seksi Tata Kelola SDM Teknologi Informasi dan Komunikasi)
- c. Ibu. Ida Setyo Wahyu, S.E (Kepala Bagian Umum dan Kepegawaian)
- d. Masyarakat yang mengurus administrasi kependudukan

Teknik Pengumpulan Data

4. Pembagian Potensi

Penyebab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas (Bambang Sunggono, 1994 : 149-153).

a. Wawancara

b. Dokumentasi

Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang sesuai dengan penelitian ini adalah analisa data model Miles and Huberman :

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)
- b. Penyajian Data (*Data Display*)
- c. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Definisi Konsep Penelitian

Konsep adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang akan diteliti. Definisi konsep Implementasi Kebijakan SIAK Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang adalah suatu kebijakan tentang sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pengelolaan informasi administrasi

kependudukan sehingga terselenggara administrasi kependudukan yang lengkap, akurat, terpadu, tertib, transparansi, serta

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang dikaji berdasarkan empat dimensi yang dikemukakan oleh George C. Edwards III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :

1) Komunikasi

Komunikasi dalam hal ini diartikan sebagai proses penyaluran informasi dari para pembuat kebijakan kepada para pelaksana sehingga mereka mengetahui apa yang harus dikerjakan. Komunikasi ini dilakukan oleh pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang. Pada penelitian ini dimensi komunikasi dilihat dari bagaimana kebijakan SIAK dikomunikasikan kepada semua pihak terkait terutama kepada masyarakat umum yang merupakan sasaran dari kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam implementasi kebijakan SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang telah dilaksanakan secara maksimal. Komunikasi yang berjalan dapat melalui bernagai pintu. Kebijakan SIAK disosialisasikan kepada masyarakat baik secara daring melalui media elektronik maupun langsung oleh tim yang turun langsung ke masyarakat maupun melalui bantuan pemerintah kecamatan dan pemerintah desa. Sosialisasi juga dilakukan melalui brosur atau leaflet, media elektronik seperti website, situs internet. Brosur/leaflet tentang prosedur pelayanan administrasi kependudukan ditempel di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang sehingga

pelayanan administrasi kependudukan yang dilakukan secara daring / online.

mudah dilihat dan dibaca oleh masyarakat. Pihak Dinas juga melakukan kerjasama dengan bantuan pemerintah kecamatan dan kelurahan untuk menyampaikan penerangan/penjelasan langsung kepada masyarakat pada kegiatan atau kesempatan pertemuan dengan masyarakat.

2) Sumberdaya

Syarat berjalannya suatu pemerintahan adalah kepemilikan terhadap sumberdaya. Implementasi kebijakan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumberdaya yang penting untuk melaksanakan kebijakan. Sumberdaya yang dimaksud mencakup terutama adalah (1) sumberdaya manusia, (2) sumberdaya finansial, dan (3) sumberdaya waktu. Sumberdaya manusia berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas maupun kualitas implementor/pelaksana kebijakan; sumberdaya finansial menyangkut ketersediaan atau kecukupan dana untuk sebuah kebijakan, termasuk sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kebijakan tersebut; sedangkan sumberdaya waktu berkenaan dengan estimasi waktu yang dibutuhkan dalam setiap tahapan kegiatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumberdaya manusia pegawai untuk pelaksanaan kebijakan SIAK secara kualitas sudah cukup baik dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerja serta untuk meningkatkan kualitas pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang melakukan upaya yaitu dengan adanya pelatihan khusus seperti diklat dan bimtek. Sumberdaya finansial untuk pelaksanaan kebijakan SIAK cukup memadai dilihat dari dana yang dialokasikan dari APBN dan APBD. Sumberdaya waktu untuk pelaksanaan

kebijakan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan berjalan cukup cepat dimana hal itu

3) Disposisi (Sikap Pelaksana)

Disposisi ini berkenaan dengan kesediaan/komitmen, konsistensi dan kejujuran dari para implementor/pelaksana untuk melaksanakan kebijakan dengan baik dan benar, serta tingkat demokrasi dalam pelaksanaannya. Hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa komitmen pegawai untuk melaksanakan SIAK dengan efektif sudah cukup tinggi dilihat dari kesungguhan dan semangat kerja. Konsistensi pegawai dalam melaksanakan SIAK dengan baik dan efektif juga cukup tinggi dilihat dari ketaatan mereka melaksanakan pelayanan dengan sistem SIAK sesuai dengan aturan dan kebijakan organisasi/pimpinan. Kejujuran pegawai juga sudah baik yang ditunjukkan oleh tidak adanya kasus-kasus penyimpangan atau penyelewengan jabatan/tugas seperti pungutan liar, korupsi, dan lainnya yang dilakukan oleh pegawai. Tingkat demokratis pegawai dalam melaksanakan pemberian pelayanan dengan sistem SIAK juga cukup baik dilihat dari sikap pegawai dalam memberikan pelayanan yang selalu berorientasi pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang dilayani.

terlihat pada proses pelayanan kepada masyarakat dapat selesai pada satu hari kerja.

4) Struktur Birokrasi

Aspek struktur birokrasi ini melingkupi dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam pelaksanaan kebijakan biasanya sudah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap pelaksana dalam bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak bertolak belakang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi rumit yang mengakibatkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pelayanan dengan sistem SIAK ditetapkan dengan SOP (Standard Operating Procedure) yang mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan mudah dipahami oleh para pegawai pelaksana, serta mudah diikuti/dilakukan oleh masyarakat yang dilayani. Struktur organisasi dan pembagian kerja untuk pelaksanaan SIAK tertata dengan baik, jelas dan sederhana. Struktur organisasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang menganut sistem hirarki yaitu hanya terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, 4 Bidang, 3 Sub bagian, dan 12 Seksi. Pembagian kerja ditetapkan secara jelas dalam uraian tugas pokok dan fungsi (Tupoksi).

Faktor Pendukung

Faktor pendukung implementasi kebijakan dikaji menurut D.L. Weimer dan Aidan R. Vining (1999;38) dalam Pasolong (2010;59) terdapat 3 faktor, yaitu : Logika, Hakikat Kerjasama, dan Ketersediaan Sumberdaya manusia. Hasil penelitian diuraikan sebagai berikut :

1) Logika

Yang digunakan oleh suatu kebijakan yaitu sampai seberapa benar teori yang menjadi landasan kebijakan atau seberapa jauh hubungan logis antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) telah berjalan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Dimana Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang SIAK menjadi payung hukum serta dasar pelaksanaan dari implementasi kebijakan sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK).

2) Hakikat Kerjasama

Yang dibutuhkan yaitu apakah semua pihak yang terlibat dalam kerja sama merupakan suatu assembling produktif. Hasil penelitian menyatakan bahwa kerjasama yang terjadi antara pelaksana kebijakan dalam pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat sudah cukup baik. Kerjasama merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu kebijakan. Apabila kerjasama yang terjalin kurang maksimal maka kebijakan tidak dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3) Ketersediaan Sumberdaya Manusia

Berkenaan dengan yang memiliki

kemampuan, komitmen untuk mengelola pelaksanaannya. Hasil penelitian menyatakan bahwa komitmen antar pelaksana kebijakan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang terjalin sudah baik. Hal ini ditandai dengan saling memberikan loyalitasnya untuk mencapai tujuan bersama dan berpegang teguh pada integritas terkait pelaksanaan tugas.

Faktor Penghambat

Faktor penghambat implementasi kebijakan dikaji menurut Bambang Sunggono terdapat 4 faktor, yaitu : isi kebijakan, informasi, dukungan, dan pembagian potensi.

1) Isi Kebijakan

Berkenaan dengan penyampaian isi kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang sebagai pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan yakni masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyampaian isi kebijakan baik kepada pelaksana kebijakan yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang maupun disampaikan kepada masyarakat mudah dipahami dengan melakukan adanya upaya seperti sosialisasi tentang kebijakan tersebut dan bimtek-bimtek untuk pelaksana kebijakan.

2) Informasi

Berkenaan dengan penyampaian informasi antar pelaksana kebijakan dan kepada masyarakat. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyampain informasi antar pelaksana dan masyarakat berjalan cukup baik. Pentingnya penyampaian informasi kepada masyarakat baik secara langsung melalui sosialisasi ke kecamatan atau kelurahan maupun tidak langsung dengan memanfaatkan sosial media harus rutin dilakukan

karena dilihat dari latar belakang masyarakat sangat bermacam-macam misalnya orang tua yang masih belum melek teknologi sehingga berpengaruh pada data kependudukan dimana data kependudukan harus memuat informasi yang valid.

3) Dukungan

Berkenaan dengan dukungan masyarakat terhadap kebijakan SIAK dalam pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Jombang. Hasil penelitian menyatakan bahwa masyarakat kabupaten jombang memberikan respon yang positif terhadap kebijakan pemerintah tentunya dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang lebih baik dimana hal itu terlihat dari adanya pelayanan secara online atau daring sehingga masyarakat juga merasakan

kemudahan dari pelayanan secara online atau daring.

4) Pembagian Potensi

Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. Hasil penelitian menyatakan bahwa pembagian tugas antar pelaksana kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun, untuk segi keahlian pelaksana kebijakan diberlakukan sistem rolling supaya masing-masing pelaksana dapat menguasai seluruh rangkaian proses pelayanan administrasi kependudukan. Sehingga kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1) Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 ; a) Komunikasi, dalam proses komunikasi yang terjadi antara pelaksana kebijakan dengan masyarakat berjalan cukup baik, b) Sumber daya, dari segi kualitas SDM sudah memadai, sumber daya waktu dalam pelayanan cukup baik, dan sumber daya finansial sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemerintah sesuai APBN dan APBD, c) Disposisi, sikap pelaksana kebijakan cukup baik dalam melaksanakan tugas melayani masyarakat, dan d) Struktur birokrasi, pelaksana kebijakan menjalankan tugas sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta baik mekanisme prosedur pelayanan maupun petunjuk pelaksanaan dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2) Faktor pendukung pada Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Berdasarkan Permendagri No. 7 Tahun 2019 ; a) Logika, Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang yang berjalan saat ini sudah sesuai dengan arahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri, b) Kerjasama, kerjasama antar pelaksana kebijakan sudah melakukan kerjasama yang cukup baik dalam melayani masyarakat, dan c) Sumber Daya Manusia, para pelaksana kebijakan memiliki integritas, komitmen, dan loyalitas yang baik untuk mencapai tujuan bersama. 3) Faktor penghambat pada Implementasi Kebijakan Sistem

Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) ; a) Isi Kebijakan, penyampaian isi kebijakan kepada pelaksana maupun masyarakat untuk proses penyampaiannya mudah dipahami melalui sosialisasi dan bimtek, b) Informasi, dalam penyampain informasi pelaksana kebijakan kepada masyarakat sudah

cukup baik, c) Dukungan, masyarakat memberikan respon yang positif terhadap kebijakan pelayanan secara daring melalui sosialisasi, dan d) Pembagian potensi, seluruh petugas melaksanakan tugas sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

6. SARAN

- 1) Seiring perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dapat dilakukan pendekatan secara daring seperti sosialisai melalui media sosial (Fb, Ig, Wa, Youtube, Website) dengan cara penyampaian informasi yang menarik dan mudah dipahami oleh masyarakat. Sosialisasi melalui media sosial juga harus dilakukan secara berkala dan rutin serta bisa dibentuknya tim khusus media sosial supaya dalam penyampaian informasi kepada masyarakat lebih maksimal lagi kedepannya.
- 2) Sosialisai tentang pentingnya administrasi kependudukan tidak hanya melalui dalam jaringan (daring). Tetapi juga masih terdapat masyarakat

yang masih belum melek teknologi sehingga sosialisasi secara langsung dengan cara datang langsung ke kelurahan maupun kecamatan harus dilakukan secara rutin dan konsisten. Sosialisai secara langsung juga dapat dilakukan melalui kegiatan-kegiatan atau event publik yang mana dalam kegiatan tersebut banyak masyarakat yang menghadiri sehingga penyampaian informasi kepada masyarakat lebih efektif lagi kedepannya.

- 3) Perlunya konsistensi dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu serta kerjasama dan komitmen dari berbagai pihak sehingga data kependudukan masyarakat dapat terselesaikan dengan baik dan masyarakat bisa terlayani secara maksimal.

7. REFERENSI

Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Widodo, J. (2006). *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.

Bambang, Sunggono. (1994). *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: PT. Karya Unipress.

Pasolong, Harbani. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Ahmad, Jamaluddin. (2015). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Kepres No. 88 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Administrasi Kependudukan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Permendagri No. 25 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengkajian Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Peraturan Bupati No. 46 Tahun 2016
Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Permendagri No. 7 Tahun 2019 Tentang
Pelayanan Administrasi
Kependudukan Secara Daring